

## **ABSTRAK**

### ***SIFA NUR HIDAYAH : PEMBERIAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN***

Pemberian denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang, termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan, hingga penegakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan. Pelaksanaan aturan perundang-undangan dan peraturan tambahan lainnya, berkaitan dengan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terkadang berbeda di lapangan, diakibatkan oleh berbagai faktor.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penindakan hingga penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya, dan di wilayah hukum Kabupaten Kuningan sehingga diputuskan sanksi pidana denda, bagi para pelanggar perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum tersebut, untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa saja kendala dalam penindakan hingga penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dan angkutan jalan di wilayah hukum Kuningan, hingga dapat mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi/mencegah adanya kendala tersebut.

Teori yang dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini ada tiga antara lain teori efektivitas hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum. Ketiga teori ini dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pemeriksaan, penegakan hingga penyelesaian hukum perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang dapat dijadikan dasar berpikir para penegak hukumnya, agar dapat terciptanya tata hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memfokuskan penelitian pada pengkajian penerapan kaidah maupun norma yang ada dalam hukum positif, untuk mengetahui sejauhmana kaidah hukum maupun norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum, diterapkan oleh unsur-unsur penegakan hukum pada kasus penegakan hukum, terhadap perkara-perkara yang sudah diputuskan di persidangan. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pidana denda perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pemberian pidana dendanya di lapangan, dan akhirnya dicari dan ditemukan beberapa upaya penyelesaian kendala yang disebabkan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kendala tersebut, yang tertuang secara menyeluruh dalam bahasan penelitian skripsi ini.